

**IMPLEMENTASI SURAT KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 363
TAHUN 2009 TENTANG PENUNJUKAN DESA FOKUS DI DESA
LAYAK OMANG KECAMATAN MUKOK KABUPATEN SANGGAU**

Oleh:

Elvidius A.J.D. Putra^{1*}

NIM. E.1013161023

Elyta,², Dewi Utami,²

*Email: Ajdputra0600@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Namun pada kenyataannya pelaksanaan tersebut belum optimal, hal tersebut dilihat dari masih adanya desa yang tidak mendapatkan bantuan karet unggul desa fokus. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan desain penelitian adalah analisis deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori implementasi Edward III (Subarsono, 2005:90) menyebutkan 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Komunikasi belum pernah dilakukan oleh pemerintah daerah baik komunikasi kepada masyarakat yaitu dengan sosialisasi dan komunikasi kepada instansi teknis terkait. (2) Sumber daya dalam hal ini staf/pegawai yang tidak masih kurang, sumberdaya keuangan dan peralatan tidak mencukupi. (3) Disposisi yang kurang dipahami pelaksana sampai tingkat desa tidak bisa dijalankan oleh implementor. (4) Struktur birokrasi yang mendukung implementasi kebijakan bantuan bibit karet unggul desa fokus tidak berjalan karena tidak ada pembenahan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan penyusunan SOP (standar operasional prosedur). Rekomendasi penelitian agar dilakukan komunikasi berupa sosialisasi ditingkat kecamatan dan desa. Sumberdaya manusia, fasilitas, dan anggaran perlu ditambah. Struktur organisasi harus dilakukan perbaikan terutama SOP (standar operasional prosedur).

Kata Kunci: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi, Desa Fokus

ABSTRACT

This study aims to determine the results of the implementation of the Regent's Decree Number 363 of 2009 concerning the Appointment of Focus Villages in Desa Layak Omang, Mukok District, Sanggau Regency. However, in reality the implementation is not yet optimal, this can be seen from the existence of villages that do not receive superior rubber assistance from the focus villages. The method used in this research is a qualitative method, the research design is descriptive analysis. The theory used is the theory of implementation Edward III (Subarsono, 2005: 90) states 4 factors that influence the success of implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this study indicate that: (1) Communication has never been carried out by the local government, both by communicating with the community, namely by socializing and communicating with related technical agencies. (2) Resources, in this case staff / employees, are not still lacking, financial resources and equipment are insufficient. (3) The implementor does not understand the position until the village level cannot be carried out by the implementor. (4) The bureaucratic structure that supports the implementation of the assistance policy for superior village rubber seedlings does not work because there is no improvement in the form of institutional strengthening and preparation of SOPs (standard operating procedures). Research recommendations for communication in the form of socialization at the sub-district and village levels. Human resources, facilities and budget need to be added. The organizational structure must be improved, especially SOP (standard operating procedures).

Keywords: Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure, Focus Village

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Sanggau memiliki tantangan yang spesifik didalam mengejar pertumbuhan daerah dan pemberdayaan serta pembangunan masyarakat, tantangan yang utama adalah kesenjangan di berbagai bidang, baik infrastruktur maupun sosial. Kesenjangan yang terjadi pada Kabupaten Sanggau disebabkan oleh luasnya wilayah dan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sanggau saat ini. Oleh karena itu, sejak tahun 2009 pemerintah daerah Kabupaten Sanggau mencanangkan suatu program dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Program tersebut dikenal dengan program Desa Fokus sebagai salah satu amanat dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Program desa fokus sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi pembangunan desa, dalam pembangunan desa dilakukan usaha intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada daerah tertentu melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat desa. Desa fokus merupakan program bersama Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka membangun desa secara lebih terpadu, terarah, terkoordinasi dan bersinergis.

Berkenaan dengan hal itu, maka mulai tahun anggaran 2010, pemerintah Kabupaten Sanggau menetapkan kebijakan dan program pembangunan desa secara fokus dan berkelanjutan melalui pembiayaan APBD (dan sumber lainnya) yang dituangkan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) masing-masing OPD yang ada di Kabupaten Sanggau. Usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda serta akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas didesa dalam rangka melaksanakan program masing-masing. Kegiatan program desa fokus Kabupaten Sanggau dilakukan dengan sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terpadu dari berbagai sektor terkait. Demi kelancaran pelaksanaan kegiatan program tersebut, dibentuk Tim Pelaksana Fasilitasi Program Desa Fokus.

Strategi pembangunan desa fokus yang digunakan adalah model teori obat nyamuk, yaitu bermula dari pinggir menuju sentral, dengan logika bahwa desa maju maka kecamatan maju, kecamatan maju maka kabupaten secara keseluruhan akan maju. Program ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sudah memasuki tahun kesepuluh sejak dirumuskan pada tahun 2009 dan mulai dilaksanakan

pada tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 tentang Penunjukan Desa Fokus di Kabupaten Sanggau.

Pelaksanaan kebijakan Program Desa Fokus secara umum dilatarbelakangi oleh minimnya pembangunan dan pemberdayaan serta dominasi fenomena kemiskinan pada masyarakat pedesaan. Dalam hal ini, konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari kurangnya kesempatan berusaha, kurangnya keterampilan yang dimiliki masyarakat, sampai menyangkut aspek sosial. Salah satunya adalah minimnya akses mobilitas masyarakat yaitu infrastruktur fisik berupa jalan, yang berimbas pada kurangnya kesempatan usaha bagi masyarakat. Kondisi demikian juga dialami oleh desa yang ada di Kecamatan Mukok yaitu Desa Layak Omang sebagai desa yang ditunjuk menjadi desa fokus.

Penunjukan desa Layak Omang sebagai desa fokus adalah bentuk perhatian pemerintah Kabupaten Sanggau dalam memperhatikan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan tanaman karet yang didampingi oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau. Sebagai salah satu desa yang memiliki potensi karet, masyarakat Desa Layak Omang bermata pencaharian dengan mengandalkan dari hasil karet. Disamping itu, penunjang perekonomian masyarakatnya antara lain sebagai

petani padi dan berkebun sawit begitu pula dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Mukok. Sedangkan dari sektor peternakan, masyarakat Desa Layak Omang masih mengandalkan dengan beternak sapi.

B. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan dapat diartikan sebagai tindakan politik atau serangkaian prinsip, tindakan yang dilakukan seseorang, kelompok atau pemerintah atau sektor terhadap suatu masalah (Wahab, 2002:13).Selanjutnya, Laswell (dalam Badjuri dan Yuwono, 2003:9) menyatakan “policy is projected programe of goal, values and practice”, bahwa kebijakan adalah suatu program yang diproyeksikan dari tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah.

Menurut Rose (dalam Agustino, 2014:7) berupaya mendefinisikan kebijakan publik,” sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.” Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi. Kemudian menurut Presthus (dalam Santosa, 2009:34) mengatakan bahwa kebijakan, dalam pengertian yang paling fundamental, adalah satu pilihan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok,

dengan maksud agar pilihan ini dapat menjelaskan, membenarkan, memedomani, atau mengerangkakan seperangkat tindakan, baik yang nyata maupun tidak. Kebijakan publik seringkali terbentuk dari kompromi politis diantara para perumus dan tidak seorangpun perumus kebijakan merupakan pencetus murni dari masalah yang disepakati. Kebijakan lahir dari sistem perumusan kebijakan. Menurut Winarno (2004:28) dalam hal penyusunan kebijakan, terdapat tahap- tahap yang harus dilaksanakan secara berurutan antara lain yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan.

Sehingga secara garis besar, kebijakan publik (public policy) merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Akhir dari sebuah kebijakan adalah keberhasilan ketepatan sasaran sehingga kebijakan tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat ataupun target group. Menurut Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2012:148) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tabible output). Istilah implementasi

menunjuk kepada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Sementara itu implementasi kebijakan menurut Daniel Mazmanian dan Sabatier (dalam Nugroho, 2012:685) adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan. Maksudnya ialah bahwa berbagai upaya atau program yang dilakukan oleh pemerintah merupakan implementasi dari suatu kebijakan yang sebelumnya telah dirumuskan. Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan-pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya.

Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Menurut Edward III (dalam Agustino, 2006:157) mendefinisikan komunikasi merupakan salah satu variabel

penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Mutawali dalam Mulyadi (2009:59) mendefinisikan pembangunan masyarakat desa sebagai “seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat.”

Surjadi dalam Mulyadi (2009:59) menjelaskan bahwa, pembangunan masyarakat desa adalah suatu gerakan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan atas inisiatif masyarakat, dengan partisipasi aktif dan apabila mungkin didasarkan pada inisiatif masyarakat, tetapi apabila inisiatif ini tidak muncul, maka dipergunakan teknik-teknik untuk menimbulkan dan mendorong agar inisiatif itu keluar.

Wiryoemarto dalam Mulyadi (2009:58) mendefinisikan bahwa, pembangunan masyarakat desa adalah istilah yang dipakai guna

menjelaskan pendekatan yang digunakan untuk mendekati masyarakat desa dalam rangka pemanfaatan inisiatif dan kekuatan lokal yang lebih efektif untuk meningkatkan produksi dan standar hidup yang lebih baik. Menurut Sumaryadi (2005:111) pemberdayaan masyarakat merupakan, upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan, dalam suasana keadilan sosial yang berkelanjutan. Untuk itu upaya pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Hasil penelitian yang relevan sangat membantu peneliti dalam mendukung penelitian yang akan dilakukan, karena hasil penelitian yang relevan dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan perbandingan dalam penelitian. Menurut Masyuri dan Zainudin (2008:100) tinjauan pustaka mencakup cuplikan isi bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil penemuan peneliti terdahulu yang relevan dengan masalah yang ada. Untuk menunjang penelitian,

penulis meninjau beberapa hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ilmiah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menemukan jawaban dan menjelaskan suatu permasalahan yang diteliti guna menemukan pemecahan dari masalah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud memberikan keadaan atau gambaran yang ada di lapangan dan meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian.

Menurut Nawawi (2009:63) metode deskriptif adalah “Proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tempat sebagaimana adanya”. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering juga disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). Hal

ini berarti penelitian yang dilakukan berguna untuk memberikan gambaran yang objektif tentang Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 tentang Penunjukan Desa Fokus. Adapun metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis berdasarkan data fakta dari para informan.

Dalam langkah-langkah penelitian, untuk mendukung dan memperjelas data-data yang diperlukan, peneliti melakukan pra penelitian, pergi ke perpustakaan dan terjun langsung ke tempat penelitian yang menjadi objek sasaran peneliti. Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh informasi/data yang lebih jelas dan akurat maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh teori-teori, pendapat-pendapat para ahli serta kerangka pikir dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Pada penelitian ini penulis mencoba untuk mencari literatur di berbagai perpustakaan, seperti di Perpustakaan Daerah (Pusda) Kabupaten Sanggau serta mencari bahan referensi di perpustakaan kampus. Peneliti mencari bahan dan teori apa yang sesuai dengan masalah mengenai Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 tentang Penunjukan Desa Fokus.

Penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati langsung fakta yang ada dilokasi penelitian untuk memperoleh data-data, dan informasi yang ada sifatnya relevan dengan permasalahan penelitian. Penulis perlu terjun langsung ke lapangan agar dapat menemukan, melihat, merasakan, dan mendapatkan informasi data yang diperlukan.

Penelitian dilakukan di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau dan di Desa Layak Omang.

Pemilihan lokasi tersebut berdasar pertimbangan bahwa di Desa Layak Omang memiliki masalah tidak adanya bantuan bibit karet unggul yang mana Desa Layak Omang menjadi salah satu Desa Fokus yang diperhatikan pemerintah Kabupaten Sanggau. Adanya permasalahan tidak sampainya bantuan dan perhatian terhadap desa fokus Desa Layak Omang ini menarik untuk diteliti dengan menggunakan aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Surat Keputusan Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 tentang Penunjukan Desa Fokus terutama dalam pelaksanaan bantuan bibit karet unggul yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau yang ada di Desa layak Omang Kecamatan Mukok.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini yaitu Surat Keputusan

Bupati Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 tentang Penunjukan Desa Fokus terutama dalam pelaksanaan bantuan bibit karet unggul yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau yang ada di Desa layak Omang Kecamatan Mukok.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mengumpulkan data. Dalam penelitian tentang Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau ini teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari informan menggunakan instrumen wawancara secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi tentang apa yang diteliti. Adapun teknik yang digunakan untuk membantu peneliti dalam melakukan pengumpulan data yaitu terdiri dari : wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2007:183) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas dalam analisis data antara lain reduksi data, display data, dan

verifikasi data.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian menurut Sugiyono (2007:333) terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Kebijakan publik merupakan sesuatu yang bersifat kompleks. Hal ini disebabkan karena dalam sebuah kebijakan publik akan melibatkan berbagai aktor, berbagai proses, maupun variabel yang harus dikaji. Kebijakan publik merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mencari berbagai alternatif dari sebuah permasalahan yang muncul di masyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Palumbo (1994:6) kebijakan merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas masalah-masalah yang sulit dan jawaban yang akan dipilih akan selalu memiliki oposisi, tidak ada pernah kesepakatan total bahwa kebijakan tertentu adalah cara terbaik untuk menyelesaikan masalah.

Menurut James Anderson (dalam Agustino, 2008:7) memberikan pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan

dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Sedangkan menurut Jones (1991:46) kebijakan publik adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan yang mematuhi keputusan tersebut.

Tahapan implementasi suatu kebijakan merupakan suatu hal yang sangat krusial, dikarenakan tahapan ini akan menentukan keberhasilan atau kegagalan dari implementasi suatu kebijakan. Demikian pula dengan Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau. Untuk itulah diperlukan kesiapan yang matang dalam melakukan implementasi kebijakan tersebut sejak dari tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan pengevaluasian kebijakan tersebut.

Oleh karena itu, untuk menganalisis bagaimana tindakan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau terhadap komitmen perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap desa fokus sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten sanggau Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) bahwa faktor-

faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yakni: (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi.

Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) yang mengatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah komunikasi. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi dapat ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada personalia yang tepat.

Implementasi suatu kebijakan publik mungkin saja tujuan yang telah dibuat sudah jelas dan logis, tetapi bukan hanya faktor tersebut yang menyebabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari implementasi kebijakan publik. Keberhasilan implementasi kebijakan sangatlah tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya tersebut dapat berupa sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif. Karena tanpa adanya sumber daya,

kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) struktur birokrasi dalam proses implementasi sangat diperlukan, karena ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi yang baik.

Struktur birokrasi adalah adalah sebuah penempatan dengan tugas-tugas birokrasi yang sangat rutin dicapai melalui spesialisasi, aturan, dan ketentuan yang sangat formal. tugas-tugas yang dikelompokkan kedalam berbagai departemen fungsional. wewenang terpusat, rentang kembali sempit, dan pengambilan keputusan mengikuti

rantai komando. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks sehingga ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian yaitu;

Implementasi kebijakan desa fokus Kabupaten Sanggau dalam bantuan bibit karet unggul telah dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau sebagai dinas teknis yang memiliki tupoksi dalam pengelolaannya. Peran Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Camat Mukok dan pemerintah Desa Layak Omang sebagai implementator utama dalam melaksanakan bantuan karet unggul desa fokus masih jauh dari optimal, Hal ini bisa terlihat dari kenyataan dilapangan bahwa adanya bantuan karet unggul yang tersalurkan kepada desa Layak Omang. Dengan adanya bantuan tersebut dapat membantu kesejahteraan masyarakat Desa layak Omang.

Dalam implementasi Untuk melihat seberapa besar pencapaian yang telah diraih oleh kebijakan tersebut, peneliti kemudian memutuskan untuk melakukan penelitian berkenaan dengan Surat keputusan Bupati Sanggau tentang desa fokus terhadap bantuan karet unggul Desa Layak Omang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, peneliti menyimpulkan terdapat beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya kebijakan ini. Adapun faktor-faktor yang dimaksud diantaranya yaitu :

1. Komunikasi

Dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan bantuan bibit unggul desa fokus sudah dilakukan. Komunikasi tersebut dijalankan dengan cara sosialisasi akan tetapi, masih minimnya komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau terhadap bantuan bibit unggul Desa layak Omang hanya dilakukan satu kali sehingga kejelasan informasi terhadap bantuan bibit unggul desa fokus masih belum bisa dipahami oleh pemerintah Desa Layak Omang.

2.Sumber daya

Kemampuan dan ketersediaan Sumber daya manusia dalam menjalankan ketersediaan sumber daya manusia masih belum cukup untuk mendampingi desa fokus pada bantuan karet unggul. Ketersediaan sumber daya manusia yang belum mencukupi akan menyebabkan implementasi kebijakan mengalami

hambatan dan dalam proses pencapaian tujuan kebijakan juga akan mengalami gangguan. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau dalam melakukan pekerjaan memerlukan dukungan keuangan misalnya untuk sosialisasi dan berdampingan ke desa. Sehingga dalam menunjang Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau masih memerlukan perlengkapan untuk menunjang kegiatan.

3. Disposisi

Dapat disimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau bahwa masih adadisposisi yang tidak sampai kepada pelaksana kebijakan ditingkat paling bawah. Intensitas kecenderungan pelaksana akan mempengaruhi kinerja para pelaksana. Intensitas terhadap kebijakan yakni sejauh mana para agen pelaksana melakukan kontrol terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Kontrol yang dilakukan dapat berupa tindakan pengawasan terhadap desa Layak Omang.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang ada disimpulkan bahwa berdasarkan

belum menajalankan desa fokus. Sedangkan urusan pelaksanaan menurut Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 363 tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus memttuskan pada poin (3) yang berbunyi Kecamatan Selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkedudukan di Kecamatan bertugas: (a) Mengkoordinasikan unit kerja yang ada di Kecamatan dalam mendukung pelaksanaan desa fokus di wilayah kerja masing-masing. Sedangkan pada poin (c) juga dikatakan bahwa : kecamatan memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan membina serta melaporkan pelaksanaan pembangunan desa fokus yang ada di wilayahnya.

Dapat disimpulkan juga bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau sulit bagi mereka untuk dapat melaksanakan bantuan bibit unggul desa fokus sendiri, maka diperlukan peran dari semua unsur terkait dalam mengimplementasikannya termasuk peemrintahan paling bawah adalah pemerintah desa Layak Omang.

2. SARAN

Berdasarkan analisis pada pembahasan hasil penelitian serta kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, penelitian akan memberikan rekomendasi melalui

saran-saran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar evaluasi terhadap Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau, yaitu sebagai berikut :

Pada komunikasi yang dijalankan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau, Camat Mukok dan Pemerintah Desa layak Omang perlu melakukan komunikasi yang baik caranya dengan sosialisasi rutin dan monitoring lapangan. Karena pada dasarnya sebuah kebijakan harus disampaikan kepada semua masyarakat (target grup) sehingga sasaran dari desa fokus dapat terlaksana dengan baik.

Dalam hal sumber daya, staf pelaksana harus mengikuti diklat dan bimtek (bimbingan teknis) terkait pelaksanaan yang melibatkan pelaksana bagian perkebunan, pihak Kecamatan Mukok dan Pemerintah Desa Layak Omang sebagai upaya untuk meningkatkan kompetensi. Selain itu sumberdaya keuangan dan peralatan harus dilakukan dengan perincian yang benar dan transparan terhadap apa yang menjadi program bantuan karet unggul desa fokus tersebut.

Dalam mewujudkan suatu Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau yang

optimal, maka perlu memaksimalkan peran dari pelaksana. Mulai dari tahap penganggaran, perencanaan, pendampingan. Untuk itu disarankan agar pada setiap tahapannya harus dilakukan pengawasan dan pendampingan sebagai upaya tepat sasaran.

Struktur birokrasi dalam pelaksanaan Implementasi Surat Keputusan Bupati Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus Di Desa Layak Omang Kecamatan Mukok Kabupaten Sanggau sudah semstinya dilengkapi dengan SOP (standar operasional prosedur) yang jelas bagaimana petunjuk pelaksana dilapangan. Saran yang dapat direkomendasikan oleh peneliti adalah dengan membuat standar operasional yang jelas terkait siapa yang melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga dengan demikian implementasi kebijakan desa fokus dapat sesuai harapan. Selain itu peneliti juga menyarankan agar administrasi Desa Layak Omang perlu di perbaiki dengan menyiapkan sumberdaya manusia yang ada, mengingat Desa Layak Omang merupakan desa baru yang perlu diperhatikan baik kesejahteraan masyarakat maupun administrasi dalam ruang lingkup pemerintah desa.

F. DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

, . 2008. Analisis Kebijakan. Malang : UMM Press.

Winarno, Budi. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

, . 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo

, . 2012. Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

, . 2016. Kebijakan Publik Era Globalisasi (teori proses dan studi kasus komperatif. Jakarta: Buku Seru

Dokumen:
Surat Keputusan Bupati kabupaten Sanggau Nomor 363 Tahun 2009 Tentang Penunjukan Desa Fokus

